

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM TANTANGAN BUDAYA PATRIARKI

Oleh : Henny Yusalia *)

Abstract :

The term gender mainstreaming (PUG) refers to the understanding that the concept of gender should be encouraged to be understood by the public. Which emphasizes the aspect of gender equality and social justice role, must be maximized, so that domination and "oppression" of women can be minimized. PUG concept inevitably be faced with socio-cultural and political realities of society, which is still very dominant with a patriarchal culture. The power of patriarchal culture (male power) already attached so strong in the community, even the legitimacy of the woman. This article also wants to raise the issue of the implementation of gender mainstreaming in the context of the strong theoretical patriarchy. This theoretical study shows that the various elements of society, patriarchal culture is still maintained and there is justification to continue. Eventhough, it also related to religious beliefs and traditions that take place. On the other side of a patriarchal culture has also strengthened with the emergence of popular culture which emphasizes aspects of the material, so that women often used as commodities. This further reinforces the patriarchal culture, as well as challenges for PUG.

Key Word : *Gender, Pengarusutamaan Gender, Patriarki*

Pendahuluan

Ada sebuah rumah tangga di wilayah pedesaan Sumatera Selatan. Rumah tangga ini terdiri dari seorang suami, seorang istri dan tiga orang anak yang masih usia sekolah. Suaminya bekerja di kebun karet, setiap hari berangkat jam 5 subuh dan kembali sekitar jam 11 siang. Setelah itu ia banyak di rumah, istirahat. Siang hari sang suami hanya berada di rumah dan sore hari kumpul-kumpul dengan tetangga dan kenalannya hingga menjelang magrib. Sementara sang istri, sejak sebelum subuh sudah menyiapkan minuman kopi serta bekal sarapan untuk suami yang akan ke kebun. Setelah itu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya yang akan berangkat sekolah, menyiapkan perlengkapan sekolah. Rutinitas selanjutnya adalah mencuci piring, pakaian, bersih-bersih rumah. Tak lama berselang ia sudah harus menyiapkan untuk makan siang, memasak dan sebagainya, karena sebentar lagi sang suami akan pulang. Setelah itu ia membersihkan halaman rumah dan kegiatan lainnya. Rutinitas tersebut berlangsung hingga menjelang magrib dan terus sampai malam hingga menjelang subuh lagi.

Ilustrasi di atas adalah rutinitas yang banyak ditemukan pada masyarakat di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Baik kalangan pedesaan maupun perkotaan, menunjukkan gejala serupa. Realitas tersebut,

mau tidak mau harus diakui menempatkan posisi perempuan sebagai kelompok yang harus mempersiapkan tenaga ekstra, rutinitas kerja yang hampir 24 jam setiap hari. Realitas tersebut menjadi semakin berat, ketika sang istri juga memiliki profesi lain, seperti guru, karyawan, dan pekerjaan lainnya. Dua pekerjaan harus dilakukan sekaligus, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja.

Hasil Susenas 2011 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan berada pada kisaran 51,67% dan laki-laki 83,60%. Dominasi memang masih pada laki-laki, terutama aspek pekerjaan yang di luar rumah. Pekerjaan yang diasumsikan menghasilkan uang secara langsung. Hanya saja dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah maka tekanan pekerjaan yang harus dilakukannya juga semakin besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena realitas masyarakat di Indonesia masih membebankan tanggung jawab menyelesaikan urusan rumah tangga adalah kewajiban perempuan. Walaupun perempuan tersebut sudah bekerja di luar rumah dengan profesi lain, namun tetap saja urusan domestik rumah tangga harus mereka urusi.

Tingginya tekanan pekerjaan terhadap kaum perempuan, hampir berlangsung di semua lapisan dan tipe masyarakat. Asumsi umumnya adalah, laki-laki bekerja di luar rumah mencari nafkah, sementara istri bertanggungjawab mengurus urusan rumah tangga. Kalaupun ada istri yang ikut bekerja dan mencari nafkah, cenderung hanya dipandang sebagai pelengkap pekerjaan suami, walaupun pada beberapa hal justru lebih dominan peran perempuan daripada laki-laki dalam mencari nafkah.

Potret di atas seakan mengukuhkan bahwa budaya dominasi laki-laki (patriarki) sangat kuat di masyarakat, dan budaya tersebut menjadi senjata ampuh untuk melakukan tekanan terhadap perempuan. Perbedaan gender dan konsep patriarki sering membawaperempuan ke arah konflik dengan laki-laki, konflik yang semata-mata menempatkan perempuan ke dalam posisi sebagai korban (*victim*). Misalnya dalam masalah kekerasandalam rumah tangga (KDRT), atau yang sekarang ini telah banyak terjadi, kekerasandalam pacaran (KDP). Posisi yang (dianggap) tidak setara, menjadikan perempuan tidak memahami akan hak-haknya dan menganggap bahwa kekerasan dan pelecehan yang mereka alami merupakan suatu hal yang wajar, dan bila kekerasan yang mereka alami mengakibatkan luka fisik dan psikologis yang serius, perempuan cenderung masih memilih untuk bungkam. Bagi mereka, mengungkapkan peristiwa kekerasan dan pelecehan merupakan sesuatu yang memalukan dirinya dan (terutama) keluarganya. Tidak mengherankan jika perempuan memikul beban ganda yang begitu berat, selain harus memikul kehormatan dirinya, ia juga harus menanggung kehormatan keluarganya.

Menyikapi terhadap hal itulah muncul kemudian gerakan-gerakan dan gagasan untuk mendudukkan posisi kesetaraan peran baik laki-laki dan perempuan. Disinilah gagasan gender dan pengarusutamaan gender (PUG) mulai diluncurkan. PUG berusaha menjawab bahwa konsep gender, yang menekankan aspek peran sosial laki-laki dan perempuan yang tidak dibatasi jenis kelamin, harus dimaksimalkan. Namun pada sisi lain, tekanan dan tantangan budaya patriarki tetap mengemuka. Budaya patriarki yang seakan sudah menjadi kebenaran di masyarakat dan mendapat legitimasi di masyarakat setempat, semakin mengukuhkan dominasi dan tekanan tersebut.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kata gender seringkali diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), lebih sering lagi dipersamakan dengan kata perempuan. Sebenarnya ada perbedaan dasar dan filosofis antara dua kata tersebut yang kemudian berimplikasi pada aplikasi pemahaman di masyarakat.

Jenis kelamin (sex) adalah perbedaan jenis kelamin laki dan perempuan berdasarkan alat reproduksinya. Perbedaan ini bersifat kodrati dan tidak bisa digantikan dan berlaku sampai kapanpun, misalnya memiliki rahim, yang hanya dimiliki oleh perempuan. Sementara pengertian gender ditekankan pada perbedaan sifat laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh hasil konstruksi sosial atau dibentuk oleh kondisi tertentu. Perbedaan ini timbul karena karakter masyarakat, budaya yang ada, sistem kepercayaan, berlaku khusus tidak universal, dan bisa berubah-ubah. Konsep gender bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan.

Pandangan ini sudah pernah dibahas pula oleh Mansour Fakih (1999) bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial budaya, yang sengaja diciptakan oleh masyarakat setempat, yang memang memiliki dominasi budaya patriarki. Perbedaan yang terjadi bukan hanya soal aspek biologis dan fisik semata, namun juga ada masalah dalam hal nilai-nilai yang terkandung pada aspek sosial budaya.

Konteks Indonesia juga mengalami dan memiliki gejala yang disebutkan di atas. Aspek budaya yang melekat di masyarakat masih sangat dominan dengan pengukuhan peran laki-laki di atas peran perempuan. Analogi pada awal tulisan ini menunjukkan gejala yang hampir bisa dipastikan ada di semua daerah di Indonesia. Setidaknya ini tampak dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2011 masih berada di posisi 67,20%, dan angka Indeks Pembangunan Manusia ada di posisi 127 dari 187 negara. Tantangan terhadap pembangunan gender masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum selesai.

Pada beberapa sisi masih sangat banyak terdapat pembatasan-pembatasan pada hak-hak perempuan secara sosial. Ini terlihat dari berbagai pantangan dan larangan yang bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan. Hal ini kemudian akan berefek pada psikologis mereka setelah dewasa. Sistem sosial budaya yang ada sangat dominan membentuk kepribadian masyarakat, sehingga perilaku-perilaku yang ada kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar, baik oleh laki-laki ataupun perempuan (Zuntriana, 2006).

Masalah dominasi laki-laki dan tekanan sistem sosial budaya yang ada, kemudian berefek pada tindakan terhadap kaum perempuan. Hal yang menonjol adalah munculnya perilaku kekerasan atau terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Analisis dari Komnas Perempuan (2002) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lazim terjadi bisa berupa kekerasan fisik, penyiksaan mental, deprivation ekonomi, diskriminasi, kekerasan seksual, intimidasi terhadap perempuan, dan perdagangan perempuan. Data Komnas Perempuan tahun 2011 menunjukkan pula bahwa sepanjang tahun 2011 sudah terjadi 119.117 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan. Jumlah ini naik 13,2% dari tahun sebelumnya.

Pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan, dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Sosialisasi

tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang mengunggulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekadar objek pelengkap, tidak penting, dan dapat diperlakukan sekenanya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntutnya untuk mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya. Pelekatan ciri-ciri tersebut (stereotip), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki (Komnas Perempuan, 2002).

Terhadap konteks inilah dilakukan berbagai upaya untuk membangun kesetaraan dan kesadaran gender di masyarakat. Konsep PUG menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Pemerintah sendiri mensikapi hal ini dengan mengeluarkan Inpres No. 9/2000 yang menyebutkan konsep pengarusutamaan gender. Maknanya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan dilakukan dan, sementara hal ini dilakukan, berusaha mengenyahkan hal-hal yang secara sistematis menjadi akar penyebab ketimpangan yang terjadi. Hal ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak seperti kebijakan-kebijakan 'universal' yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi kepentingan laki-laki dan perempuan.

Budaya Patriarki

Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior, berada di atas wanita dan melakukan kendali terhadap wanita. Budaya seperti ini tumbuh di masyarakat sejak zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu. Laki-laki adalah yang terhebat dan menentukan kehidupan wanita. Hal ini kemudian bertemu dengan beberapa pemahaman ajaran agama, yang begitu mudahnya ditafsirkan menjadi bias gender.

Ari Zuntriana (2006) mengatakan bahwa pemahaman terhadap budaya patriarki memang memerlukan penekanan tersendiri. Budaya patriarki yang diidentikkan dengan memperlihatkan posisi laki-laki lebih hebat, superior, sebagai pelindung bagi kaum wanita, kemudian menjadi alat yang ampuh untuk terus dilakukan sampai kapanpun. Hal ini kemudian memang menjadi salah satu yang memicu munculnya berbagai tindakan yang melakukan dominasi kuat terhadap kelompok perempuan.

Menguatnya budaya patriarki (budaya dominasi laki-laki) memang menjadi fenomena kuat di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tampak dari bagaimana dunia sosial budaya dan realitas yang diciptakan semuanya berawal dari sudut pandang laki-laki. Efeknya adalah pada partisipasi kaum perempuan dalam berbagai wilayah kehidupan. Faktor penghambat umumnya muncul dari kondisi ekonomi, relasi kekuasaan, mitos, budaya, dan segregasi gender. Muaranya adalah budaya patriarki. Prilaku dan struktur masyarakat patriarki dengan sengaja menempatkan perempuan dalam kondisi yang serba terbatas dan penuh kekangan (Wacana ELSPAT, edisi 30).

Realitas budaya patriarki ini dengan mudah bisa dilihat dari aturan-aturan formal yang ada bahwa perempuan adalah subordinat. Faktanya tampak dari larangan perempuan untuk jadi pemimpin, larangan perempuan untuk beraktifitas tertentu di luar rumah, kewajiban bahwa perempuan harus mengurus urusan rumah tangga, dan sebagainya.

Di Sumatera Selatan hal ini juga berkembang, seperti bagaimana institusi-institusi adat melestarikan hal tersebut. Contoh gampangnya seperti keputusan bersama yang harus diambil oleh laki-laki, misalnya dalam forum warga, rumah tangga, sampai pada aspek pemerintahan dan politik. Laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi, lebih kuat, lebih mampu, dan bahkan dianggap lebih rasional. Profesi-profesi tertentu selalu menempatkan aspek yang bias gender seperti ini, misalnya, perempuan menjadi perawat, perempuan menjadi sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Hal yang sama tampak dari budaya yang mengharuskan bahwa urusan masak memasak adalah wilayahnya perempuan, bahkan di sebagian masyarakat mengatakan bahwa tabu apabila laki-laki yang mengurus anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya.

PUG dan Tantangan Budaya Patriarki

Penjelasan di atas memberikan sebuah argumentasi yang kuat bahwa dalam wilayah Pengarusutamaan Gender (PUG), tantangan terbesar adalah soal budaya patriarki. Hal ini menggejala dengan kuat di semua elemen masyarakat bahwa di wilayah pemerintahan.

Tantangan yang dihadapi dalam konteks budaya patriarki terhadap PUG ini mengemuka dalam bentuk diskriminasi-diskriminasi yang terjadi. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut adalah (Zulhayatin, 2013) :

a. Stereotipe

Tantangan ini adalah dalam bentuk pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Dalam konteks budaya patriarki, pelabelan ini mengarah pada kelompok perempuan. Label ini seperti tampak dalam asumsi bahwa perempuan itu lemah, mudah menangis, emosional, dan sebagainya. Akibatnya posisi tertentu dianggap hanya cocok dipegang oleh jenis kelamin tertentu.

b. Subordinasi

Tantangan ini menekankan pada tindakan yang memberikan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin. Subordinasi ini terlihat dari sikap mengelompokkan dan membedakan antara dua

jenis kelamin yang ada. Yang satu dianggap lebih tinggi daripada yang lain.

c. Marginalisasi

Peminggiran atau menjauhkan akses salah satu kelompok jenis kelamin pada posisi tertentu ataupun pada kondisi tertentu. Yang terjadi adalah adanya pembatasan hak-hak dan kesempatan yang dimiliki, sehingga ada kelompok yang tidak diberikan akses untuk itu. Menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua (tampak dari bagaimana sebuah kebijakan pemerintah dibuat ataupun bagaimana institusi adat melakukan upaya-upaya marginalisasi tersebut).

d. Beban berlebihan

Ada kecenderungan untuk memberikan porsi-porsi pekerjaan tertentu pada kelompok tertentu, yang sebenarnya itu sudah berada di luar kemampuannya. Hal ini kemudian dijadikan kebenaran, bahkan oleh kedua kelompok itupun. Seperti bagaimana beban pekerjaan rumah tangga yang semuanya dianggap sebagai tanggungjawab perempuan, sementara pada sisi lain mereka juga dituntut untuk aktif dalam berbagai kegiatan lainnya.

e. Kekerasan

Hal ini masih menjadi fenomena tersendiri yang semuanya merupakan ujung dari proses yang terjadi. Tindak kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, kerap menimbulkan masalah-masalah tertentu dan memberikan ruang diskriminasi antara berbagai kelompok yang ada. Kaum perempuan adalah kelompok yang paling sering ada di wilayah ini.

Tantangan pelaksanaan PUG dalam konteks menguatnya budaya patriarki juga masuk ke wilayah lain, terutama aspek sosiologis dan antropologis masyarakat. Aspek sosiologis ini terlihat dari bagaimana interaksi sosial yang berlangsung, perkembangan kebudayaan manusia yang semuanya masih sangat dominan sebagai bentuk dominasi kaum laki-laki. Sementara dari aspek antropologis terlihat dari bagaimana sistem kebudayaan dan pola budaya yang terbentuk cenderung mengabaikan ruang-gerak yang bisa dilakukan oleh perempuan.

Konsep PUG yang sebenarnya sudah masuk dalam ranah kebijakan pemerintah, harus diakui tetap menemui hambatan pada beberapa aspek di masyarakat. Ada kesulitan karena stereotipe yang sudah berkembang secara kuat dan kokoh di masyarakat. Bagi masyarakat muncul aspek pembenaran bahwa diskriminasi yang terjadi bukanlah sebuah bentuk kesalahan, namun terkadang dianggap sebagai sebuah bentuk pembenaran secara adat dan tradisi yang ada.

Di level pemerintah juga masih memperlihatkan adanya kecenderungan untuk tidak memahami aspek ini secara total dan menyeluruh. Kendatipun PUG sudah diluncurkan, namun aplikasinya tetap saja tersendat. Setidaknya hal ini tampak dari bagaimana posisi jabatan-jabatan strategis yang semuanya dominan di pegang oleh kaum laki-laki. Sebagian

malah masih mengasumsikan bahwa memang itu hanya bisa dipegang oleh laki-laki.

Tantangan budaya patriarki memberikan masalah tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan pluralisme yang berlangsung. Realitasnya tampak dari bagaimana kelompok tertentu kemudian sulit menerima kelompok pada posisi tertentu. Sebagai contoh, menjadikan perempuan sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, dan pimpinan strategis lainnya, masih dianggap kurang tepat. Di beberapa daerah sebenarnya hal ini sudah mulai tampak, namun perimbangannya masih belum memuaskan.

Penutup

Tantangan PUG dalam konteks budaya patriarki, menguat dalam bentuk menguatnya stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban berlebihan, dan kekerasan. Fenomena ini tampak hadir di semua level masyarakat dan sistem sosial budaya yang ada. Kendati sudah ada kebijakan dalam bentuk dorongan pelaksanaan PUG, namun faktanya, kekuatan budaya patriarki selalu menguat dan diperkuat. Diperlukan waktu panjang dan upaya terus menerus untuk menempatkan posisi PUG sebagai posisi strategis dalam melaksanakan konsep kesetaraan gender.

Referensi

- Fakih, Mansour, ***Analisis Gender dan Transformasi Sosial***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Gusfa, Henni, ***Komunikasi dalam Konstruksi Identitas Gender***, Unpad Press, Bandung, 2010
- ILO, ***Strategi Pengarusutamaan Gender***, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2003
- Jurnal Wacana ELSPAT, ***Perempuan dan Politik Pangan***, Edisi 30/VIII.
- Komnas Perempuan, ***Seksualitas dan Demokrasi***, Laporan Penelitian tahun 2011
- Komnas Perempuan, ***Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia***, Jakarta, 2002
- Zulhayati, Siti Ruhaini, ***Gender, PUG dan PPG***, makalah pada Sekolah Demokrasi Prabumulih, 2013.
- Zuntriana, Ari, ***Gender, Perempuan dan Budaya Patriarki***, Essay pada Jambore Nasional Pemberdayaan Gender, 2006